Peran Perguruan Tinggi Dalam Kerjasama Internasional

Abstract

Developments in the world makes international relations today demonstrate the increasing of non-state actors role. International relations nowadays has involved actors such as universities, local governments, private parties, and even individuals. States remain the main actors in international relations, and the state also acts as a regulator of the relationships that occur between non-state actors, such as cooperation between them. Cooperation also occurs in the higher education, carried out in different areas, but the most commonly implemented is a research collaboration and cooperation to get a degree. Cooperation is implemented as the way to succeed the globalization of a nation as it can be seen from the welfare and progress of the nation. Indonesia looks that higher education as an important vehicle in enhancing the progress of the nation and the state, and therefore the higher education should be able to run a strategic role for the empowerment and development of Indonesian society toward education. Therefore, it is considered important to have international cooperation between universities. In addition, the role of higher education in international relations is also considered very important for cooperation in the field of education is one of Indonesia's foreign policy applications. The role of universities in international relations can be seen in the internationalization of higher education. Internationalization of higher education is the effort made by the higher education institutions in the country to improve the quality of education that is equivalent to the quality of education on an international scale.

Keyword: cooperation, globalization, higher education, internationalization, university role

Pendahuluan

Sebagai sebuah peristiwa dan fenomena, globalisasi mulai meningkat sejak tahun 1990an.³¹ Globalisasi ditunjukkan dengan berkurangnya biaya transportasi secara drastis dan meningkatnya sarana komunikasi yang murah dan cepat, sehingga batas-batas geografis tidak lagi menyulitkan untuk berbagai urusan, terutama urusan ekonomi. Perdagangan yang melintasi batas negara pun menjadi lebih mudah dengan adanya globalisasi.³²

Menurut alur pikir neoliberal, globalisasi mampu mendatangkan manfaat sangat besar bagi suatu negara melalui pasar bebas dan kerjasama ketika interaksi masyarakat yang berbeda wilayah semakin mudah dilakukan.³³ Neoliberalis berpendapat bahwa dengan adanya pasar bebas dan kerjasama, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya akan berupaya memberikan hasil

³¹ Ben Thirkell-White, "Globalization and Development", dalam Trevor C. Salmon dan Mark F. Imber (eds.), *Issues in International Relations 2nd Edition*. New York: Routledge. 2008. Hlm. 136

³² *Ibid*

³³ *Ibid*, Hlm. 137

yang terbaik agar mampu meraih keuntungan. Kompetisi untuk menghasilkan yang terbaik akan memberikan keuntungan bagi satu sama lain sehingga mampu saling berkontribusi secara efisien.

Di sisi lain, menurut pandangan *agency-centered*, globalisasi menguntungkan bagi negara hanya apabila negara tersebut mampu membuat regulasi politik yang menjamin keuntungan bagi negara itu sendiri. Bagi negara-negara berkembang, keuntungan dan kerugian yang mungkin ditanggung sangat tergantung pada regulasi politik yang dibuat pemerintah, karena globalisasi itu sendiri merupakan suatu proses politik yang kompleks.

Kompetisi merupakan salah satu unsur utama dalam globalisasi, sehingga kompetisi diperlukan agar masing-masing pihak yang terlibat dalam globalisasi mau mengupayakan hasil terbaik agar dapat bertahan dan mendapat keuntungan. Selain kompetisi, kerjasama juga sangat penting, karena antara satu pihak dengan pihak lain saling membutuhkan dan melengkapi, dan hal tersebut bisa dipenuhi dengan adanya kerjasama.

Pengaruh Globalisasi di Bidang Pendidikan

Globalisasi menjadi salah satu fenomena yang digunakan oleh *World Trade Organization* (WTO) untuk menjalankan liberalisasi jasa di negara-negara anggotanya. Indonesia mulai bergabung menjadi WTO sejak tahun 1994. Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada di dalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional, dengan adanya Undang Undang No.7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Sebagai anggota WTO, Indonesia wajib mengikuti dan menjalankan berbagai perjanjian liberalisasi perdagangan, termasuk perdagangan jasa pendidikan.³⁴

Penyediaan jasa pendidikan merupakan salah satu dari 12 sektor jasa lainnya yang akan diliberalisasi. Liberalisasi perdagangan sektor jasa pendidikan berdampingan dengan liberalisasi layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, serta jasa-jasa lainnya. Ilmu ekonomi membagi 3 (tiga) sektor kegiatan usaha dalam masyarakat. Sektor pertama adalah sektor primer mencakup semua industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian. Kedua, sektor sekunder mencakup industri untuk mengolah bahan dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur dan *utilities*. Sektor ketiga, sektor tersier yang mencakup industri-industri

³⁴ Departemen Pertanian. *Tentang WTO* <<<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>>>. Diakses pada 13 November 2012

untuk mengubah wujud benda fisik (*physical services*), keadaan manusia (*human services*) dan benda simbolik (*information and communication services*). Sejalan dengan pandangan ilmu ekonomi tersebut, WTO menetapkan pendidikan sebagai salah satu industri sektor tersier, karena kegiatan pokoknya adalah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan orang yang tidak mempunyai keterampilan menjadi orang yang berpengetahuan dan mempunyai keterampilan.

Keberhasilan suatu negara dalam menghadapi globalisasi dapat dilihat dari kesejahteraan dan kemajuan bangsanya. Kesejahteraan dan kemajuan bangsa ini dapat dilihat dari daya cipta dan kreativitas para cendekiawannya dalam perekonomian, atau dikenal sebagai ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).³⁵ Ekonomi Berbasis Pengetahuan (EBP) adalah perekonomian yang berbasis pada produksi, distribusi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Iptek merupakan penggerak utama dalam pertumbuhan dan penciptaan kemakmuran ekonomi. Ekonomi berbasis pengetahuan memiliki tiga tujuan umum, yaitu:

1. *Knowledge society*, yaitu masyarakat yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan nilai tambah bagi sumberdaya, kegiatan ekonomi dan sosial
2. *Knowledge workers*, yaitu pekerja yang mampu memberi nilai tambah bagi pekerjaannya melalui pemanfaatan Iptek dan informasi
3. *Knowledge capital*, yaitu sumberdaya pengetahuan yang diciptakan atau dikembangkan untuk menghasilkan nilai tambah lebih pada kegiatan ekonomi dan sosial

Pembentukan kembali ekonomi global pada masa kini sangat dipengaruhi oleh munculnya *knowledge society*.³⁶ Hal ini karena pengetahuan (*knowledge*) selalu menjadi faktor penting dalam produksi, serta mengendalikan perkembangan ekonomi dan sosial. Digitalisasi informasi dan penggunaan internet meningkatkan intensitas penggunaan pengetahuan oleh masyarakat luas. Masyarakat menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pengetahuan untuk berbagai macam kepentingan. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi masyarakat karena dapat lebih meningkatkan produktivitas ekonominya. Selain itu, mudahnya mendapatkan pengetahuan juga mendorong masyarakat untuk berinovasi di bidang ekonomi. Inovasi merupakan ide-ide

³⁵ Materi dalam Pelatihan Mengenai Internasionalisasi Pendidikan di UR

³⁶ What Is Knowledge Society? <<<http://www.pragfoundation.net/concept/what-is-knowledge-society/>>>. Diakses pada 13 November 2012

baru mengenai bagaimana melakukan sesuatu secara lebih cepat dan lebih baik. Inovasi mendorong terciptanya kompetisi di bidang ekonomi, sehingga menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Knowledge society membutuhkan para pekerja yang mampu menyerap informasi baru dan mengolahnya secara cepat, menciptakan inovasi, beradaptasi secara berkesinambungan untuk menciptakan kesempatan, bekerja cerdas, serta menciptakan teladan yang baik dalam pekerjaan. Pekerja seperti inilah yang disebut dengan *knowledge worker*.

Knowledge worker pada masa sekarang ini sangat diperlukan karena menciptakan dan mengelola pengetahuan menjadi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi.³⁷ *Knowledge worker* merupakan pekerja yang mahir dalam mencari serta memilih data yang tepat, kemudian mengolahnya menjadi informasi yang bermanfaat. Informasi tersebut kemudian menjadi suatu pengetahuan yang berguna bagi perusahaan atau organisasi tempat *knowledge worker* itu bekerja. Ketika seseorang meningkatkan pengetahuannya, secara tidak langsung seseorang tersebut juga telah meningkatkan pengetahuan orang lain maupun organisasi tempat ia bekerja.³⁸ Para *knowledge worker* dituntut untuk kreatif dan mempunyai daya inovasi yang tinggi. Ciri khasnya adalah haus akan pembelajaran, termasuk belajar dari pengetahuan dan pengalaman, dan terus mengembangkan pengetahuannya sehingga kontribusinya bagi organisasi meningkat.

Knowledge capital merupakan pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun dalam berbagai bentuk, seperti *papers*, laporan-laporan, buku-buku, artikel-artikel, manuskrip-manuskrip, hak paten, dan perangkat lunak.³⁹ *Knowledge capital* terdiri dari hasil pemikiran manusia yang tersedia bagi siapa saja yang perlu. *Knowledge capital* (sumber daya pengetahuan) merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan atau organisasi.⁴⁰ Pada masa sekarang, produktivitas suatu perusahaan juga diukur dari *knowledge capital* yang dimilikinya. *Knowledge capital* menjadi sangat penting bagi perusahaan karena hal tersebut merupakan *intangible assets*

³⁷ Daniel Christiananda. *Knowledge Worker*. <<http://www.bfi.web.id/blc/index.php?option=com_content&view=article&id=633:knowledge-worker&catid=41:hr-wilayah&Itemid=129>>. Diakses pada 13 November 2012

³⁸ Menciptakan *Smart Knowledge Worker* <<<http://www.portalhr.com/publikasi/resensi/menciptakan-smart-knowledge-worker/>>>. Diakses pada 13 November 2012

³⁹ Dharminder Singh Ubha dan Mahesh Joshi, *Accounting for Knowledge Capital in the Emerging Economy of India: Concepts and Issues*, Hlm. 2

<<<http://www.wbiconpro.com/23%5B1%5D.Dharminder.pdf>>>. Diakses pada 13 November 2012

⁴⁰ Paul A. Strassman, "Value of Knowledge Capital", *American Programmer*, Maret 1998 Vol. 11 No. 3, Hlm. 5

(aset tak terlihat), namun hasil yang diciptakannya sangat besar. Salah satu contoh *knowledge capital* adalah penggunaan pengetahuan secara luas oleh para pekerjanya, sehingga meningkatkan efisiensi dalam operasi perusahaan dan keuntungan diperoleh dari usaha tersebut.

EBP dari suatu negara dicerminkan dalam *Knowledge Economy Index* (KEI) yang terdiri dari empat pilar utama⁴¹, yaitu:

1. Pilar Rezim dan Kinerja Ekonomi

Rezim insentif ekonomi suatu negara sangat berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan secara global. Kompetisi yang terjadi secara global menuntut perusahaan-perusahaan dan individu untuk menggunakan ilmu pengetahuan untuk menciptakan barang dan jasa secara efisien. Apabila rezim yang ada tidak mendorong terjadinya kompetisi, maka tidak ada tuntutan untuk menggunakan ilmu pengetahuan untuk memproduksi barang dan jasa secara lebih baik dan efisien. Diperlukan lingkungan yang kompetitif agar memotivasi perusahaan-perusahaan dan individu agar lebih efisien, dan hal ini akan memengaruhi difusi pengetahuan.

2. Pilar Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan merupakan sarana untuk menciptakan, memperoleh, mengadaptasi, mendiseminasi, dan menggunakan ilmu pengetahuan. Adanya orang-orang yang berpendidikan dan berketerampilan dalam suatu negara dapat menciptakan, membagi, dan menggunakan ilmu pengetahuan dengan baik. Orang-orang berpendidikan merupakan elemen yang paling penting untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan baru serta perubahan teknis yang cepat, dimana hal tersebut diperlukan untuk mencapai ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.

3. Pilar Inovasi dan Adopsi Teknologi

Ada tiga komponen penting dalam sistem inovasi, yaitu lembaga riset, universitas, dan industri. Keberadaan institusi-institusi ini secara fisik saja tidak cukup, lebih penting adalah sampai sejauh mana mereka dapat memanfaatkan, mengasimilasikan dan mengadaptasikan ilmu pengetahuan ditingkat yang terus berkembang untuk kebutuhan lokal, serta dapat menciptakan teknologi baru. Oleh karena itu, jaringan kerja dan interaksi antara ketiga komponen sistem inovasi tersebut sangat penting dalam ekonomi berbasis pengetahuan.

⁴¹ Kementerian Negara Riset dan Teknologi. *Indikator Ekonomi Berbasis Pengetahuan*, 2009, Hlm. 2

4. Pilar Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kegiatan ekonomi dan sosial sangat dipengaruhi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kemajuan tersebut berdampak positif pada cara mengelola dan menjalankan perusahaan ataupun pemerintah. Akses yang meningkat terhadap TIK juga mempengaruhi cara orang bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Berbagai hal positif dapat dicapai karena ilmu pengetahuan merupakan bagian dalam TIK dan hal tersebut menyebabkan daya saing menjadi hal penting. TIK menjadi infrastruktur yang penting untuk ekonomi berbasis pengetahuan, karena pengaruh penggunaan TIK sangat besar dan bergantung pada *network, interconnectivity, interdependency*, dan *coordination* yang efisien

Tujuan-tujuan serta pilar-pilar dalam EBP menunjukkan perlunya pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pengetahuan. Untuk itu, salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan tingkat pendidikan dalam negeri adalah dengan melakukan internasionalisasi pendidikan tinggi atau kerjasama internasional di bidang pendidikan. Tujuan umum dari kerjasama internasional ini adalah untuk mencapai hasil seperti pada kriteria-kriteria *world-class university*. Adapun kriteria-kriteria *world-class university* adalah⁴² reputasi internasional dalam riset, reputasi internasional dalam pendidikan, peneliti kaliber dunia (*leaders in their fields*), reputasi di luar lingkungan pendidikan tinggi, program-program dan risetnya dikenal luas secara internasional, melahirkan banyak inovasi pemikiran maupun riset terapan, terobosan-terobosan baru Iptek, menarik mahasiswa terbaik dari penjuru dunia, memiliki sumber pendanaan yang kuat dan beragam, didukung tim manajemen yang unggul, lulusan menduduki posisi penting di masyarakat, berkontribusi besar bagi masyarakat dan kemanusiaan, melakukan *benchmarking* dengan universitas top dunia secara berkesinambungan, serta agenda riset dengan prioritas jelas.

2.1 Internasionalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia

Sistem Pendidikan Nasional melihat pendidikan tinggi sebagai suatu wahana penting dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan negara, dan oleh karena itu pendidikan tinggi harus

⁴² Materi dalam Pelatihan Mengenai Internasionalisasi Pendidikan di UR, *loc. cit*

mampu menjalankan peran strategis pemberdayaan dan pengembangan demi menuju masyarakat Indonesia yang berpendidikan.⁴³

Peran perguruan tinggi dalam hubungan internasional dapat dilihat dalam internasionalisasi pendidikan tinggi. Internasionalisasi pendidikan tinggi adalah upaya yang dilakukan lembaga pendidikan tinggi dalam negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga setara dengan kualitas pendidikan skala internasional.⁴⁴ Upaya peningkatan ini berupa kerjasama antara universitas dalam negeri dengan universitas luar negeri, dan telah dilakukan beberapa universitas yang ada di Indonesia.

Upaya kerjasama internasional bidang pendidikan didefinisikan sebagai kerjasama bersifat melembaga yang dilakukan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri.⁴⁵ Kerjasama ini dapat berbentuk kerja sama yang hasilnya berupa pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik yang terlibat dalam program kerja sama tersebut (Kerja Sama Bergelar) atau kerja sama yang *output*-nya tidak pada pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik namun pada pemberian Sertifikat Alih Kredit atau Sertifikat Ambil Kredit bagi peserta didik yang nantinya akan dituliskan pula pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari peserta didik ketika lulus (untuk kerja sama non gelar).

Program kerja sama internasional memiliki tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan langsung program ini adalah untuk menyiapkan mahasiswa Indonesia menjadi masyarakat global yang mendukung perdamaian dunia melalui internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sambil melakukan penguatan nasionalisme. Sedangkan secara tidak langsung, program ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas SDM Indonesia dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja internasional dengan tambahan ketrampilan multi-bahasa, komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar negara
2. Meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan
3. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs)

⁴³ Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. *Panduan Penyusunan Proposal Bantuan Fasilitasi Kerjasama Internasional Perguruan Tinggi 2012*, Hlm. 1

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 2

Program kerjasama ini juga memiliki prinsip-prinsip dasar dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, dimana penyelenggaraan program ini harus sesuai dengan aturan mengenai pendidikan umum, serta ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa
2. Kesetaraan dan saling menghormati: PT (Perguruan Tinggi) dapat menjalin kerja sama dengan PT lain di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerja sama hanya dapat dilaksanakan apabila PTLN telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya. PTDN harus terakreditasi sekurang-kurangnya B
3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan: Kerja sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi nasional
4. Berkelanjutan: Kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi pihak-pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan; kerja sama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian daerah, nasional, dan/atau internasional. Kerja sama selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya
5. Keberagaman: Kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional

Ada dua strategi yang diterapkan dalam menjalankan program kerjasama internasional. Strategi pertama adalah lembaga pendidikan tinggi wajib memahami Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Negara (KKNN) negara mitra kerjasama, serta melakukan penyetaraan antara capaian pembelajaran lulusan antarnegara berbasis KKNN tersebut. Pemahaman antara negara-negara yang bekerjasama internasional ini diperlukan karena pelaksanaan kerjasama internasional antarlembaga pendidikan tinggi dilakukan dengan pembangunan kepercayaan, serta mengikuti regulasi serta pengakuan akan KKNN asal lembaga yang terlibat dalam program kerjasama internasional.

Setelah semua pihak yang terlibat kerjasama memahami KKNN satu sama lain, maka strategi kedua yaitu menentukan jenis kerjasama yang ingin diselenggarakan, yaitu apakah kerjasama tersebut bertujuan untuk pemberian gelar (program Gelar Ganda atau Gelar Bersama), atau kerjasama tersebut tidak bertujuan gelar (non-gelar). Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Nomor 26 Tahun 2007 dapat berbentuk:

1. Kontrak manajemen
2. Program kembaran
3. Program gelar ganda (dual degree)
4. Program pemindahan kredit
5. Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik
6. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat
7. Penerbitan bersama karya ilmiah
8. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain
9. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi

Untuk melaksanakan program kerjasama yang bermuara pada pemberian gelar, maka program studi penyelenggara wajib menyusun *learning outcomes* sesuai dengan Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Program Studi yang ditetapkan oleh Ditjen Dikti tahun 2012, agar tercapai kesetaraan antar program kerjasama. Kerjasama yang bermuara pada pemberian gelar terdiri dari tiga jenis kerjasama, yaitu:

1. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*). Program ini dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua PT pada program studi yang sama dan dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan satu gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada strata1 (S-1) atau strata2 (S-2)
2. Program Gelar Ganda Reguler (*Double Degrees atau Dual Degree*). Program Gelar Ganda Reguler dilakukan oleh dua PT atau lebih pada program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada strata1 (S-1) atau strata2 (S-2)

3. Program Gelar Ganda Percepatan (Akselerasi). Program Gelar Ganda Percepatan dilakukan oleh satu atau dua PT (atau lebih) pada program studi yang sama dengan jenjang yang berbeda, misalnya S1 dan S2, atau S2 dan S3

Implementasi Kerjasama Internasional Pendidikan

Kerjasama internasional antara perguruan tinggi saat ini sudah menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Hal ini terjadi karena setiap perguruan tinggi tidak ingin ketinggalan sehingga dianggap tidak mampu bersaing dalam kancah global, menjadi perguruan tinggi kelas dunia, dan mampu membangun sinergisitas dengan perguruan tinggi yang ada di negara lain. Bagi perguruan tinggi di Indonesia, kerjasama internasional dengan perguruan tinggi asing adalah implementasi dari amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dituangkan dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 26 tahun 2007.

Kerjasama internasional perguruan tinggi ini, sebagaimana termaktub dalam peraturan menteri tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Selain itu memperhatikan hukum nasional ataupun hukum internasional, dan tidak mengganggu kebijakan pembangunan nasional dan negara, serta pertahanan dan keamanan nasional.

Aspek kerjasama internasional yang dapat dilakukan perguruan tinggi adalah pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan dan penelitian, dan atau pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama ini juga disyaratkan tidak akan membebani keuangan negara. Khusus untuk kerjasama yang memerlukan dana dari pemerintah Indonesia, pemerintah asing dan atau lembaga pemerintah di luar negeri dan atau kemudahan dari pemerintah Indonesia harus mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Semakin terbukanya peluang kerjasama internasional perguruan tinggi di Indonesia tidak lepas dari kondisi yang terjadi dalam dunia pendidikan itu sendiri, yaitu persaingan. Di satu sisi, ada upaya pemerintah dan perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing, pada saat yang bersamaan terjadi persaingan antarperguruan tinggi bukan hanya di level nasional, akan tetapi juga di lingkup internasional. Setiap lembaga pendidikan kemudian berupaya untuk menjalin sinergisitas dengan berbagai pihak demi mencapai standar daya saing yang harus mereka penuhi.

Sebagai institusi yang mengeluarkan hasil berupa manusia yang terdidik dan berpendidikan maka perguruan tinggi di Indonesia dituntut untuk mampu menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu, teknologi, dan seni, mandiri. Pada saat yang bersamaan perguruan tinggi juga didorong untuk 'mencetak' sumber manusia yang kritis, inovatif, kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia.

Tuntutan ini tentu tidak akan dapat dicapai apalagi akan diakui secara luas terutama oleh negara-negara lain bila kualitas pendidikan tinggi tidak ditingkatkan secara terus menerus. Pemerintah Indonesia sendiri memiliki kebijakan terkait internasionalisasi pendidikan tinggi. Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam bidang pendidikan telah diimplementasikan oleh berbagai universitas di Indonesia. Umumnya, kerjasama yang dilakukan telah berjalan, walaupun tetap terdapat kendala-kendala yang menghambat kerjasama. Beberapa universitas di Indonesia telah menerapkan kerjasama internasional pendidikan, dengan mengacu pada pemberian gelar. Berikut beberapa contoh penerapan kerjasama internasional pendidikan.

1. Kerjasama Universitas Indonesia dengan berbagai universitas asing (*university to university*) per Juli 2009

Negara	Universitas Partner	Bentuk Kerjasama
Belanda	Vrije Universiteit (VU)	Double Degree (Economic Development)
	Tilburg University	Double Degree (Economic Development)
	Groningen University (RuG)	Double Degree (Economic Development)
	Institute of Social Studies (ISS)	Double Degree (Economic Development)
	University of Amsterdam (UvA)	Double Degree
Jepang	National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)	Double Degree (Economic Development)
	Kobe University	Double Degree (Economic Development)
	Hiroshima University	Double Degree (Economic Development)
	International University of Japan	Double Degree (Economic Development)
	Ritsumeikan University	Double Degree (Economic Development)
	Yokohama National University	Double Degree (Economic Development)
	Keio University	Double Degree (Economic Development)
Perancis	I.A.E. de Grenoble Universite Pierre Mendes	Double Degree (MM - MBA)
	University of Nanterre - Paris X	Double Degree (Strategic Marketing)
Malaysia	International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF)	Marketing and Educational Service Provider Agreement

Sumber: Kerjasama Luar Negeri FEUI
<http://fe.ui.ac.id/index.php/kerjasama/luar-negeri>

2. Kerjasama Universitas Brawijaya dengan berbagai universitas luar negeri

NO	NEGARA	UNIVERSITAS PARTNER	JENIS/BIDANG KERJASAMA
1	Japan	Yamaguchi University	S2 Double Degree / Engineering & Biotechnology
2		Miyazaki University	S2 Double Degree / Engineering
3		Takushoku University	S2 Double Degree / Public Administration
4		Keio University	S2 Double Degree / Public Administration
5		The Retsumeikan University	S2 Double Degree / Public Administration
7	Thailand	Chiang Mai University	S2 Double Degree / Biotechnology
8		Burapha University	S2 Double Degree / Biotechnology
9		Mae Fah Luang University	S2 Double Degree / Biotechnology
10		Prince of Songkla University	S2 Double Degree / Biotechnology
11		King Mongkut University and Technology Thonburi	S2 Double Degree / Biochemical Technology, Biotechnology, Post Harvest Technology, Microbiology
12	Taiwan	National Central University	S2 Double Degree / Engineering
13		National Taiwan Ocean University	S2 Double Degree / Biotechnology
14		National Cheng Chi University	Pertukaran staf dan mahasiswa
15		National Sun Yat Sen University	S2 Double Degree / Marine Biology & Life Science

Sumber: Program Dual Degree Universitas Brawijaya
(http://www.ub.ac.id/id/Program_Akademik/double_degree_list)

Sedangkan untuk kerjasama non gelar bisa dicontohkan dengan mengadakan kerjasama dalam bentuk riset atau penelitian. Penelitian telah umum terjadi dalam kerjasama antara perguruan tinggi dalam negeri dengan perguruan tinggi luar negeri. Salah satu contohnya adalah kerjasama riset yang dilakukan oleh Universitas Riau dengan beberapa universitas luar negeri. Sudah sejak lama Universitas Riau menyelenggarakan kerjasama luar negeri dengan universitas asing dalam bentuk MoU. Khusus untuk bidang penelitian dapat dilihat berdasarkan dalam tabel yang ada berikut ini:

No	INSTITUSI	TOPICS	PARTIES	DURATION OF MoU	NOTE
1	Kyoto University Global COE Program and Indonesia Insitute of Science, Life Science	Collaborate on the advancement of knowledge and research in Giam Siak Kecil, Bukit Batu and Surrounding areas of Riau Province Sumatera Island Indonesia	Prof. Usman M. Tang; Prof. Dr. Sugihara Kaoru; Prof. Dr. Endang Sukara (signed 2009)	2009-onward	Letter of Agreement
2	Leibnits Center for Tropical Marine Ecology (ZMT) Bremen, Germany	Research, Education, and Training in the fields of Tropical Marine Ecology, Coastal Management and Biogeochemistry, Cooperate within the frameworks of education and training being pursued and planne d by the two institutes	Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS; Prof. Dr. V. Itterkot (signed March 5, 2009)	March 5th 2009-March 5th 2014	MoU
3	Kyoto Japanese University	Nano Material, Devices, and Sensors	Dr. Yanuar, M.Si with Prof. Dr. Munetaka Oyama (signed October 24th 2009)	October 24th 2009-finish	Letter of Intent for Cooperation
4	Global Centers of Excellence Program of Kyoto University	The study of Giam Siak Kecil Bukit Batu Biosphere of Riau Province, Sumatra Island	Dr. Adhy Prayitno, M.Sc with Prof. Dr. Sugihara Kaoru (signed 21st December 2008)	21st December 2008-March 2012	Letter of Agreement
5	VIT University, Nanded, India	Energy and Information Technology	Dr. Adhy Prayitno, M.Sc with Dr. G. Viswanathan (signed October 21st 2009)	October 21st 2009-October 21st 2014	Interuniversity Cooperation Agreement

Sumber: List of Partnership (MoU) Between University of Riau and Foreign Institution (Desember 2009) (<http://kui.unri.ac.id/archives/239>)

Ada beberapa bentuk kendala yang menghambat implementasi kerjasama internasional pendidikan tinggi di Indonesia. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini telah banyak dibuat *MoU* dalam bidang penelitian antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri, namun realisasi di lapangan dalam menindak lanjuti *MoU* tersebut masih sangat sedikit. Kendala umumnya berasal dari awal perencanaan kerjasama. Perencanaan yang kurang

matang menyebabkan implementasi terhambat, seperti adanya ketidakjelasan aturan ketika pelaksanaan kerjasama, sehingga menyebabkan mudahnya pihak-pihak yang bekerjasama menghindari hukuman apabila terjadi pelanggaran. Kurang matangnya perencanaan juga mampu membuat penggunaan dana dan SDM yang tidak perlu.

Pendanaan juga menjadi kendala pada sebagian besar kerjasama. Pada umumnya kerjasama para dosen Indonesia dengan pihak luar negeri dalam bidang penelitian masih bersifat individu, sehingga kesetaraan kerjasama tersebut tidaklah seimbang karena hak kepemilikan atas data hasil penelitiannya sebagian besar dikuasai oleh mitranya dari luar negeri. Adanya keterbatasan dana pendamping dari pihak perguruan tinggi Indonesia dalam memfasilitasi para dosennya untuk melakukan kerjasama penelitian dengan pihak luar negeri merupakan salah satu faktor utama sulitnya menjalin kerjasama dan rendahnya posisi tawar para dosen dari Indonesia.⁴⁶ Sumber daya manusia juga menjadi salah satu kendala ketika tidak memenuhi kualifikasi yang diinginkan. Kerjasama internasional membutuhkan SDM berkualitas agar mampu berjalan dengan baik. Ketika kerjasama internasional dilaksanakan dengan SDM kurang kompeten, maka hasil dari kerjasama tersebut biasanya tidak mencapai hasil yang diinginkan.

Penutup

Globalisasi telah memengaruhi berbagai bidang di dunia internasional. Adanya berbagai kebutuhan serta mudahnya akses komunikasi dan transportasi membuat negara saling bekerjasama untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Kebutuhan terhadap segala sesuatu yang terbaik menjadikan aktor-aktor negara dan non-negara menjalin kerjasama sekaligus menciptakan kompetisi dimana hanya mereka yang mampu memberikan yang terbaik yang akan bertahan.

Pemanfaatan peluang globalisasi secara optimal bisa dilihat dari perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa ini dapat diperkirakan dari daya cipta dan kreativitas para cendekiawannya di bidang ekonomi (*knowledge-based economy*) dengan indikator *knowledge society*, *knowledge worker*, serta *knowledge capital*. *Knowledge-based economy* ini memiliki 4 pilar, yaitu *Economic Incentive and Institutional Regime (EIR)*, *Education and Training*, *Innovation and Technological Adoption*, serta *Information and*

⁴⁶ Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. *Panduan Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional*. 2011

Communications Technologies (ICT) Infrastructure. Untuk mampu memanfaatkan peluang globalisasi ini, diperlukan usaha-usaha optimal agar menjadi yang terbaik, dan oleh karena itu terjadilah kompetisi.

Kompetisi terjadi di berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yang berkualitas kelas dunia menjadi tujuan berbagai institusi pendidikan di berbagai negara. Untuk mencapai level *world class university*, umumnya dilakukan berbagai bentuk kerjasama internasional di bidang pendidikan.

Indonesia memanfaatkan peluang globalisasi sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dalam negeri. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen DIKTI) mengeluarkan regulasi dalam bidang kerjasama internasional pendidikan tinggi. Regulasi ini mencakup apa saja yang menjadi dasar dilakukannya kerjasama, prinsip-prinsip kerjasama, dan sebagainya.

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai Indonesia di bidang pendidikan tinggi selain menciptakan *world-class university* adalah menciptakan SDM yang unggul dan kompeten; meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan; serta memenuhi kebutuhan global terhadap SDM yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dilakukan kerjasama antar lembaga pendidikan tinggi.

Kerjasama yang dilakukan antar lembaga pendidikan tinggi dilakukan dengan bertujuan gelar dan non-gelar. Kerjasama dengan tujuan gelar memiliki berbagai bentuk, terdiri dari program *double degree*, *joint degree*, serta *double degree* akselerasi. Untuk kerjasama non-gelar, kerjasama yang dilakukan berbentuk kontrak manajemen; program kembaran; program gelar ganda (*dual degree*); program pemindahan kredit; tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik; pemanfaatan bersama sumber daya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat; penerbitan bersama karya ilmiah; penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain; dan lain-lain.

Terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama. Kendala-kendala yang umumnya terjadi mulai dari perencanaan yang kurang matang, pendanaan yang kurang mencukupi, serta kurangnya SDM yang mampu memenuhi kualifikasi internasional. Hambatan-hambatan tersebut menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan kerjasama.

Daftar Bacaan

Christiananda, Daniel. *Knowledge Worker*.

<<http://www.bfi.web.id/blc/index.php?option=com_content&view=article&id=633:knowledge-worker&catid=41:hr-wilayah&Itemid=129>>. Diakses pada 13 November 2012

Departemen Pertanian. *Tentang World Trade Organization*

<<<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>>>. Diakses pada 13 November 2012

Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. 2011. *Panduan Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional*.

_____. 2012. *Panduan Penyusunan Proposal Bantuan Fasilitas Kerjasama Internasional Perguruan Tinggi*.

Kantor Urusan Internasional UR. 2012. *List of Partnership (MoU) Between University of Riau and Foreign Institution (Desember 2009)* (<http://kui.unri.ac.id/archives/239>). Diakses pada 30 Oktober 2012

Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. *Dual Degree Program UGM* (http://www.msc.feb.ugm.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=191&Itemid=236). Diakses pada 29 Oktober 2012

Materi dalam Pelatihan Mengenai Internasionalisasi Pendidikan di UR

Prag Foundation. *What Is Knowledge Society?* <<<http://www.pragfoundation.net/concept/what-is-knowledge-society/>>>. Diakses pada 13 November 2012

Rudi Kuswanto. *Menciptakan Smart Knowledge Worker*

<<<http://www.portalhr.com/publikasi/resensi/menciptakan-smart-knowledge-worker/>>>. Diakses pada 13 November 2012

Strassman, Paul A. "The Value of Knowledge Capital". *American Programmer*, Maret 1998 Vol. 11 No. 3

Ubha, Dharminder Singh dan Joshi, Mahesh. *Accounting for Knowledge Capital in the Emerging Economy of India: Concepts and Issues*.

Universitas Brawijaya. *Program Dual Degree Universitas Brawijaya* (http://www.ub.ac.id/id/Program_Akademik/double_degree_list). Diakses pada 29 Oktober 2012

White, Ben Thirkell. 2008. *Globalization and Development*. Dalam Salmon, Trevor C. dan Imber, Mark F (Eds). *Issues in International Relations 2nd Edition*. Routledge: New York